

Keadilan prosedural sebagai kunci pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan : sebuah kajian berdasarkan filsafat politik John Borden Rawls

Owin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=104135&lokasi=lokal>

Abstrak

Untuk tujuan mencari solusi agar program penanggulangan kemiskinan memperoleh hasil yang maksimal, maka refleksi awal yang harus dikerjakan adalah melakukan peninjauan kembali kepada konsep pendekatan "pemberdayaan"; apakah secara konseptual sudah dapat dikatakan tepat, dan bagaimana pula dengan perakteknya di lapangan?

Dewasa ini ketika Bangsa Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa persoalan kemiskinan berkembang semakin kompleks dan multidimensional, sementara bersamaan dengan itu program penanggulanganpun terus dilakukan, maka sebagai jawaban kritisnya adalah konsep pemberdayaan perlu disempurnakan dan yang terpenting lagi adalah prinsip-prinsip pemberdayaan perlu direfleksikan dalam bentuk kegiatan aksi di lapangan. Para pelaku utama pemberdaya yang terdiri dari seluruh unsur stakeholders, harus profesional dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan di lapangan; tanpa batasan tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sia-sia dan pemborosan saja.

Dari hasil kajian selama melakukan pengamatan dan penelitian, akhirnya ditemukan solusi penanggulangan kemiskinan ke depan yang penulis sebut dengan 12 prinsip pemberdayaan, yakni: Satu, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur stakeholders pada umumnya, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan prosedural sebagaimana yang digagas oleh John Rawls); dua, seluruh unsur stakeholders harus jujur (jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain); tiga, kemampuan melakukan problem solving, entrepreneurial, menjual inovasi, asistensi, fasilitasf promosi, dan social marketing; empat, kerjasama dan koordinasi seluruh unsur stakeholders; lima, partisipasi aktif dan seluruh unsur stakeholders; enam, lingkup dan cakupan program berlangsung secara terpadu; tujuh, mengutamakan penggalan dan pengembangan potensi lokal; delapan, aktif melakukan mobilisasi dan peningkatan swadaya yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat sendiri/kelompok sasaran (self-reliant development); sembilan, mengembangkan metode pembinaan yang konstruktif dan berkesinambungan; sepuluh, pelaksanaan kegiatan berlangsung secara gradual/bertahap; sebelas, seluruh unsur stakeholders harus konsisten terhadap pola kerja pemberdayaan; dan duabelas, komitmen serta peduli kepada misi pemberdayaan dan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu (Sense of mission, sense of community, and mission driven professionalism).

Kunci (prioritas) dari dua belas prinsip pemberdayaan terletak pada kualitas penerapan keadilan (kualitas keadilan prosedural) dan para pelaku utama pemberdayaannya. Mereka adalah yang pertama yang harus melakukan pemberdayaan kepada dirinya. Artinya bahwa sebelum duabelas prinsip pemberdayaan tersebut menjadi prinsip bersama, maka para pelaku utama pemberdayaan harus lebih awal untuk

memulainya.

Keadilan prosedural yang digagas Rawls sangat signifikan untuk mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Keadilan prosedural dari Rawls memang bukan segalanya, tetapi dalam pendekatan pemberdayaan dapat ditempatkan sebagai posisi kunci bersamaan dengan kesebelas prinsip pemberdayaan lainnya.

<hr>

Abstract

On behalf of the searching on solution to maximize the poverty program, then the requirement for the first reflection which should be conducted is to make a reconsideration on the concept of ?empowerment with questions such as: Is empowerment appropriate conceptually? And how is the practice in the field?

Right in this moment, indonesia is facing the facts on the growing of complexity of poverty problems and its multidimensional aspects. Meanwhile, along with that the poverty alleviation program that should be in going condition, then as a critical answer is the empowerment concepts should be improved and the most important are the principles of empowerment should be reflected in the field action programs. The main actors who consist of all elements of stakeholders should be professional and full of commitment to apply the empowerment principle in the fields. Without that definition then the poverty-solving program will un-useful and wasteful.

The result of observation and research arrived at a finding that the future solution on poverty alleviation needs 12 principles of empowerment. Those principles are: first, the main actor to empowerment and other stakeholder should acts in just and fair (to apply the working principle based on the procedural justice which suggested by John Rawls); second, all stakeholders elements should be honest (honest to them selves and others). Then the third, ability of problem solving, entrepreneurship, sale the innovation, assistance, facilitating, promoting and social marketing; fourth, cooperation and coordination all elements of stakeholders. Fifth, active participation of all elements of stakeholders; six, scope and covers of program should be integrated; seven, put on emphasis and development of local potency; eight, should he active to mobilize and enhance the self ability which based on people power itself or the targeted group (self-reliant development); nine, developed the methods of constructive and continuous development; ten, the gradual implementation; eleven, all elements of stakeholders should be consistent to the working pattern of empowerment; and twelve, commitment and concern on the empowerment mission and to the poor people (Sense of mission, sense of community, and mission driven professionalism).

The key or priority of that empowerment principles are on the quality of the application or implementation a justice (quality of a procedural justice) of the main actors of the empowerment program. They are the first who required to be self-empowered. its mean that the main actor should start or begin first as a requirement, before the twelve principle become the main principle.

Procedural Justice, which suggested by John Rawls is significantly support the success of poverty alleviation. Rawls procedural justice is not the answer of all problems, but it can be used as a key together with the other eleven principles.